

LAPORAN
PENELITIAN LANJUT



**Analisis kebijakan Implementasi *SUKUK* Negara
dalam pembiayaan APBN**

TIM PENGUSUL

Setyo Kuncoro,SS, M.A. NIDN.0014127105

Drs. Agus Priyanto, M.Si. NIDN.0024056703

Drs. Jasrial, M.Si. NIDN.0010126010

UNIVERSITAS TERBUKA

2014

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN KEILMUAN**

1.	Judul penelitian :	EVALUASI TENTANG KETIDAKAKTIFAN MAHASISWA PESERTA TUTORIAL ONLINE DI JURUSAN SOSIOLOGI FISIP UT
2.	a. Mata Kuliah : b. Bidang Kajian :	Keilmuan
3.	Ketua Peneliti : a. Nama Lengkap dan gelar b. Jenis Kelamin : c. Pangkat, Golongan, NIP: d. Program Studi/Jurusan e. Fakultas : f. Alamat Rumah : g. Nomor Telepon/HP : h. Email :	Setyo Kuncoro, SS.M.A. Laki-Laki Asisten Ahli/Penata Muda/ IIIb/ Administrasi/ Administrasi Bisnis FISIP - UT Perum. Bumi Insani Blok A3.20 Gg Melati Kel. Tonjong, Kec. Tajurhalang Kab. Bogor JABAR 0812 33 440 963 kuncoro@ut.ac.id
4.	Nama Anggota Peneliti	1. Drs. Agus Priyanto, M.Si 2. Drs. Jasrial, M.Si
5.	Lama Penelitian	12 (bulan)
6.	Biaya Yang Diperlukan	Rp 30.940.000,- (Tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

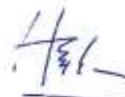
Jakarta, 13 Desember 2014

Ketua Peneliti,



Setyo Kuncoro, SS.M.A
NIP. 197112141999031001

Menyetujui,
Kepala Pusat Keilmuan,



Dr Herman, M.A
NIP. 195605251986031004



Mengetahui:
Dekan FISIP

Prof. Daryono, SH., M.A., Ph.D
NIP. 196407221989031019

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian &
Pengabdian Kepada Masyarakat



Hsianti, Ambar M.Ed., Ph.D
NIP. 196402171986032001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB 1. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Dasar Hukum Penerbitan Sukuk	6
2.2 Terori Keuangan Syariah	6
2.3 Implementasi kebijakan Penerbitan Sukuk	7
2.4 Kerangka Berpikir	8
BAB 3. METODE PENELITIAN	9
3.1 Desain Penelitian	9
3.2 Data yang diperlukan	9
3.3 Penentuan Informan	9
3.4 Tehnik Pengumpulan Data	9
3.5 Rancangan Analisis	9
3.6 Lokasi penelitian	10
BAB 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN	11
4.1.Dasar Kebijakan Penerbitan Sukuk.....	11
4.2.Penerbitan Sukuk Negara untuk Pembiayaan APBN	11
4.3 Karakteristik dan Macam-macam Sukuk	12
4.4 Manfaat Penerbitan Sukuk	14
4.5 Keuntungan penerbitan Sukuk	14
4.6 Jenis-jenis Sukuk	15
4.7 Sukuk negara sebagai Instrumen pembiayaan APBN	15
4.8 Evolusi keuangan syariah di Indonesia	16
4.9 Pembiayaan APBN	17
4.10 Proyek yang dibiayai Sukuk.....	18

	Halaman
4.10 Harga SBSN dibandingkan dengan Sukuk.....	20
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	21
5.1 Kesimpulan	21
5.1 Saran	21
DAFTAR PUSTAKA	22
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Tim Peneliti.....	24
Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota	25
Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Peneliti dan Tim Peneliti.....	33
Lampiran 4. Anggaran Biaya	34
Lampiran 5 Jadwal Penelitian	35
Lampiran 6. Pedoman Wawancara	36

BAB I.

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Sebagai Negara besar Indonesia memerlukan anggaran APBN yang besar pula. Salah satu sumber pembiayaan APBN adalah melalui utang luar negeri. Utang luar negeri Indonesia pada tahun 2013 telah mencapai 2.273,76 triliun (data per September 2013, Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu). Utang ini naik Rp 95,81 triliun dibandingkan dengan posisi Agustus 2013. Utang Negara yang besar ini tentunya akan semakin menambah beban rakyat.

Pada tahun 2008 Pemerintah melalui Departemen Keuangan telah mengeluarkan sebuah kebijakan yakni investasi syariah Sukuk Negara. Sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sukuk Negara ini akan dijual secara korporasi dan individu. Dasar Hukum penerbitan Sukuk ini adalah UU no 19/2008 tentang SBSN dan UU tentang APBN, Peraturan Pemerintah No. 56/2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN, dan PP No 57/2008 tentang Pendirian PP SBSN Indonesia, dan Peraturan Menteri Keuangan No.218/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN Ritel di pasar perdana dalam negeri yang kemudian telah diubah dengan PMK 187/2011. Melalui penerbitan sukuk negara ini pemerintah telah menyediakan alternatif investasi berbasis syariah yang banyak dibutuhkan oleh investor, baik syariah maupun konvensional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menekankan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Negara perlu meningkatkan daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam menggerakkan perekonomian nasional secara berkesinambungan. Untuk kepentingan tersebut diperlukan pengembangan berbagai instrumen keuangan yang mampu memobilisasi dana publik secara luas dengan memperhatikan nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Tujuan diterbitkannya sukuk negara ini antara lain yakni hasil investasi yang diperoleh adalah diversifikasi instrument pembiayaan APBN dan membiayai pembangunan proyek pemerintah serta mengoptimalkan penggunaan BMN. Jika memang tujuannya demikian maka harus ada sebuah riset yang bisa mengetahui sejauh mana sukuk telah berhasil mengurangi beban APBN sehingga proyek proyek pemerintah bisa berjalan dengan baik dan tidak menambah beban Negara yang berupa utang luar negeri.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penerbitan Sukuk dalam pembiayaan APBN.

3. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Maksud penelitian ini adalah hendak menganalisis kemampuan sukuk Negara dalam mengurangi beban APBN

Adapun tujuannya adalah untuk:

- a. mendapatkan pemahaman implementasi sukuk Negara
- b. menemukan konsep baru tentang langkah yang baik untuk meningkatkan peran sukuk Negara terhadap permasalahan keuangan Negara
- c. mendapatkan gambaran yang jelas terhadap keefektifan Sukuk dalam pembiayaan APBN

4. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini sbb.

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan pengembangan konsep teoritis implementasi kebijakan penerbitan sukuk negara

- b. Kegunaan praktis

Memberi masukan kepada pengambil kebijakan agar dalam mengimplementasikan kebijakan penerbitan sukuk bisa optimal

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Dasar Hukum penerbitan SUKUK

Dasar penerbitan SUKUK Negara didasarkan pada peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan dan fatwa dewan Syariah Nasional

- Undang Undang no 19/2008 tentang SBSN
- Undang-Undang tentang APBN
- Peraturan pemerintah no 56/2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN
- Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2008 tentang Pendirian PP SBSN Indonesia
- Peraturan menteri keuangan P218/2008 tentang Penerbitan dan penjualan SBSN Ritel di Pasar Perdana dalam negeri sebagaimana telah diubah dengan PMK 187/2011
- Fatwa Dewan Syariah Nasional no.69/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
- Fatwa Dewan Syariah Nasional no.70/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
- Fatwa Dewan Syariah Nasional no.71/2008 tentang Sale and Lease Back
- Fatwa Dewan Syariah Nasional no.72/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back
- Fatwa Dewan Syariah Nasional no.76/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Asset to be Lease.

A. Teori Keuangan Syariah

Sukuk berasal dari Bahasa Arab صكوك yang berarti dokumen atau sertifikat. Istilah sukuk merupakan bentuk jamak (plural) jamak dari صك Sakk, “instrument hukum, akta, cek” adalah istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk *obligasi* yang berdasarkan prinsip *syariah*. Kata *Syariah* sendiri adalah aturan atau hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadist. Sementara keuangan syariah (Islamic Finance) adalah suatu sistem keuangan yang diatur dan dikelola berdasarkan syariah Islam.

Berdasarkan Standar Syariah *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AA)IFI no 17 tentang investment Sukuk, sukuk didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tak

terbagi terhadap suatu asset, hak manfaat, dan jasa-jasa, atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu.

“Investment Sukuk are certificate of equal value representing undivided shares in ownership of tangible assets, usufruct and services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity”.

Berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan (BAPEPAM-LK), Sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau terbagi atas:

1. Kepemilikan asset berwujud tertentu
2. Nilai manfaat dan jasa atau asset proyek
3. Kepemilikan atas asset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah, sukuk (obligasi syariah) didefinisikan sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Mengacu pada AAOIFI, terdapat 14 jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk antara lain sukuk ijarah, sukuk mirabahah, sukuk salam, sukuk istisha, sukuk mudharabah, sukuk musyarakah, sukuk wakalah, sukuk mugharasah, sukuk Muzara'ah dan sukuk musaqah.

2.2 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Dalam sebuah proses kebijakan publik terdapat implementasi yang dilaksanakan setelah kebijakan dirumuskan dengan sebuah tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Ripley (1982:4) yang menyatakan bahwa implementasi adalah:

“a set of activities that follow statements of intens about program goals and desired by government officials. Implementation encompasses action and relation by variety of actors, especially bureaucrats, designed to program into effect, ostisibly in such a way as to achieve goals”.

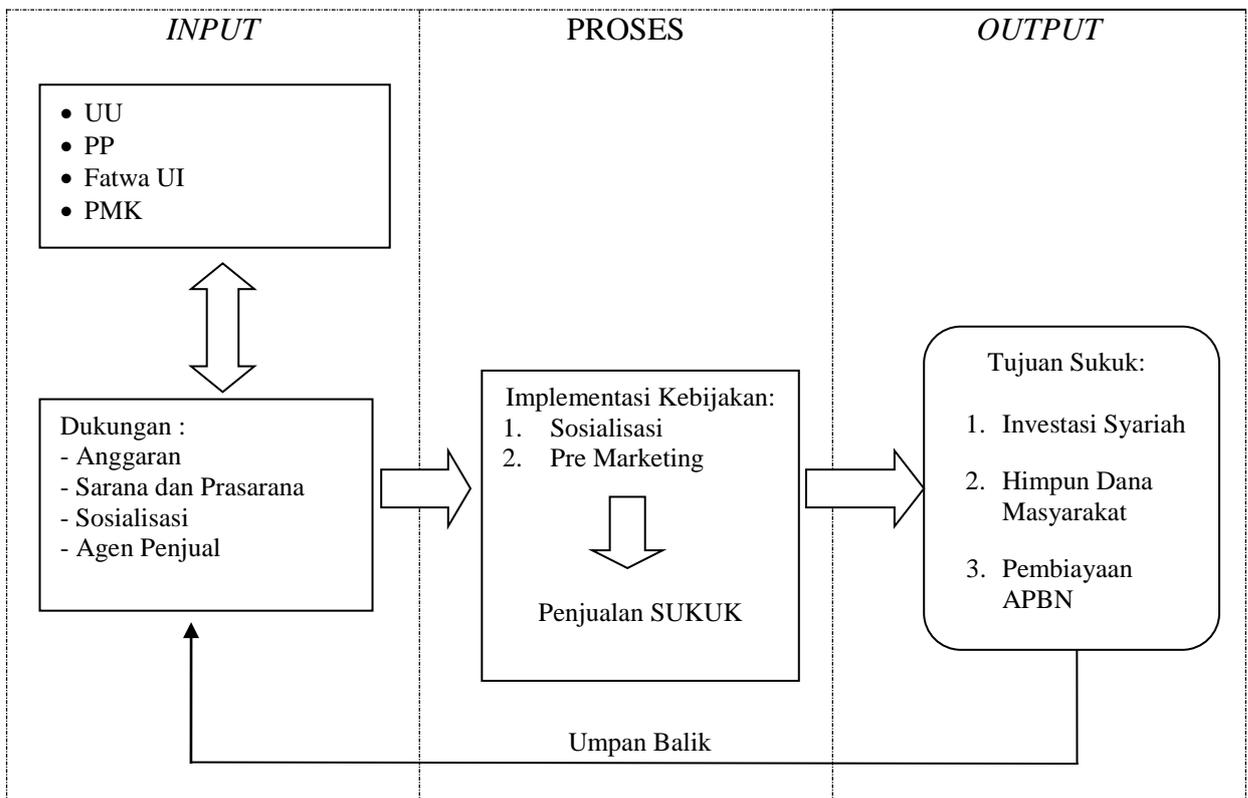
Nugroho (2003:115) menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

Pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Kebijakan pada umumnya dirumuskan dengan strategi tersendiri yang menyangkut dengan pengambilan keputusan bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau negara dalam menjalankan misi pemerintah. Kebijakan biasanya dilakukan dengan bentuk kegiatan formal. Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

Subarsono (2005:12) menyatakan bahwa : “Aspek implementasi dalam proses kebijakan publik harus memperhatikan siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dan apa yang mereka kerjakan, serta apa dampak dari isi kebijakan itu”. Sementara Suharto (2005:14) menyatakan bahwa : “Implementasi kebijakan itu merupakan proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil”.

2.4 KERANGKA BERPIKIR

Berikut adalah proses alur penerbitan SUKUK dari Input sampai ke output



BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 DESAIN PENELITIAN

Peneliti menggunakan desain kualitatif karena hendak memahami makna atas fenomena empirik dengan cara konstruktivis-interpretatif (Guba dan Lincoln: 1985) bukan hendak menunjukkan hubungan antarvariabel, menguji teori, atau mencari generalisasi.

3.2 DATA YANG DIPERLUKAN

Data yang dikaji dan dianalisis adalah implementasi penerbitan SUKUK yang terdiri atas atas: 1) proses penerbitan SUKUK, 2) hasil implementasi SUKUK, dan 3), pendapat *stakeholder* (Direktur Direktorat pembiayaan Syariah, agent penjual, pembeli SUKUK)

3.3 SUMBER DATA DAN CARA MENENTUKANNYA

Data utama yang diambil dalam penelitian ini adalah implementasi SUKUK. Cara menentukan sumber data yakni dengan menetapkan ruang lingkupnya yakni:1) Deskripsi tentang SUKUK,2) proses implementasi SUKUK, datanya diambil di Direktorat Pembiayaan Syariah di DEPKEU dan data di Agent Penjual, sedangkan data hasil implementasi kebijakan penerbitan SUKUK diperoleh melalui wawancara mendalam dengan stakeholder terkait seperti staf direktorat Pembiayaan Syariah di DEPKEU, agent penjual, pengamat perbankan syariah dan pembeli SUKUK

3.4 PENENTUAN INFORMAN

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *snowball* dengan pengambilan informan dari beberapa sumber yang bertujuan bertujuan untuk menjaga obyektivitas penelitian.

3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengamatan, *indepth interview*, studi dokumen, dan triangulasi data.

3.6 RANCANGAN ANALISIS

Peneliti mengumpulkan data, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Peneliti mengumpulkan data di lapangan, mencari data yang sesuai dengan lingkup masalah, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analitis terkait data, mencari referensi yang

berkaitan dengan data agar peneliti dapat menafsirkan secara komprehensif, membuat ikhtisar, menganalisis dan menginterpretasikannya, serta menganalisis data tersebut secara deskriptif, kualitatif, dan induktif.

3.7 LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian ini di Jakarta yakni di Departemen Keuangan

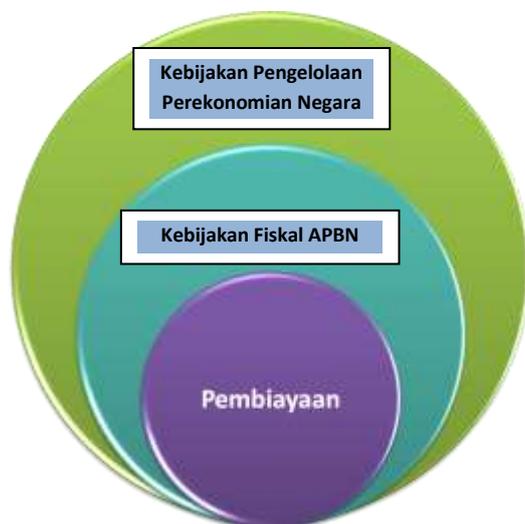
BAB 4.

ANALISIS KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SUKUK NEGARA DALAM PEMBIAYAAN APBN

4.1 Dasar Kebijakan Penerbitan Sukuk

Dasar Penerbitan SBSN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai sebuah kebijakan penerbitan Sukuk Negara. Dasar penerbitan Sukuk selain Undang-Undang juga Peraturan Pemerintah PP 56/2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN dan PP 57/2008 tentang Pendirian PP SBSN Indonesia. Dasar penerbitan sukuk negara tersebut diperkuat dengan peraturan menteri keuangan PMK 218/2008 tentang Penerbitan dan penjualan SBSN Ritel di Pasar Perdana dalam negeri sebagaimana telah diubah dengan PMK 187/2011. Penerbitan SBSN juga didukung oleh fatwa MUI, antara lain Fatwa Dewan Syariah Nasional no 69/2008, Dewan Syariah Nasional No 70/2008 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.76/2010. Adapun tujuan penerbitan ini adalah untuk memperkuat pasar modal Indonesia dengan mendorong transformasi dari *Savings-oriented society* menjadi *investment-oriented society*. Tujuan yang lain yakni untuk memberikan alternatif instrumen ritel yang berbasis syariah bagi investor.

4.2 Penerbitan Sukuk Negara untuk Pembiayaan APBN



Tujuan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian Negara:

- Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk:
 - Penciptaan kesempatan kerja
 - Mengurangi kemiskinan
 - Memperkuat pertumbuhan ekonomi
- Menciptakan keamanan

Tujuan Kebijakan Fiskal (APBN):

- Pertumbuhan ekonomi
- Mengurangi pengangguran
- Menstabilkan harga

4.3 Karakteristik dan Macam Sukuk (Obligasi Syariah)

a. Karakteristik Sukuk

Sukuk memiliki beberapa karakteristik antara lain: (Depkeu:2010),

1. merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat,
2. pendapatan berupa imbalan (kupon), marjin, dan bagi hasil, sesuai jenis aqad yang digunakan,
3. terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maisir*;
4. penerbitannya melalui *Special Purpose Vehicle* (SPV),
5. memerlukan *underlying asset*;
6. dan, penggunaan *proceeds* (hasil jual) harus sesuai prinsip syariah.

b. Macam-macam Sukuk (Obligasi Syariah)

1. Sukuk Ijarah

Adalah suatu sertifikat yang memuat nama pemilik nya (investor) dan melambangkan kepemilikan terhadap aset yang bertujuan untuk disewakan, atau kepemilikan manfaat dan kepemilikan jasa sesuai jumlah efek yang dibeli dengan harapan mendapatkan keuntungan dari hasil sewa yang berhasil direalisasikan berdasar transaksi ijarah.

Ketentuan akad ijarah sebagai berikut:

1. Objeknya dapat berupa barang (harta fisik yang bergerak, tak bergerak, harta perdagangan) maupun berupa jasa
2. Manfaat dari objek dan nilai manfaat tersebut diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Ruang lingkup dan jangka waktu pemakaiannya harus dinyatakan secara spesifik.
4. Penyewa harus membagi hasil manfaat yang diperolehnya dalam bentuk imbalan atau sewa/upah
5. Pemakaian manfaat harus menjaga objek agar manfaat yang diberikan oleh objek tetap terjaga
6. Pembeli sewa haruslah pemilik mutlak.

Secara teknis, obligasi ijarah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- Investor dapat bertindak sebagai penyewa, sedangkan emiten dapat bertindak sebagai wakil investor.
- Setelah investor memperoleh hak sewa, maka investor menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada emiten.

2. Obligasi syariah musyarakah

Adalah obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk pembangunan proyek baru, mengembangkan proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada atau membiayai kegiatan usaha.

3. Obligasi syariah istishna'

Adalah obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istishna' di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang.^{1[3]}

4. Obligasi Syariah mudarabah

yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *mudarabah* yang merupakan satu bentuk kerjasama, yang satu pihak menyediakan modal (*rabb al-mal*) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (*mudarib*), keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal.

c. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Penerbitan Sukuk

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk adalah (Depkeu:2010),

1. Obligor, adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk sampai dengan sukuk jatuh tempo.
 2. *Special Purpose Vehicle (SPV)*, adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk dengan fungsi: a. sebagai penerbit sukuk; b. menjadi *counterpart* (rekan/teman imbalan) dalam transaksi pengalihan aset; c. bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) untuk mewakili kepentingan investor.
 3. Investor, adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing.^{2[4]}
-

4.4 Manfaat Penerbitan Sukuk

Terdapat 7 manfaat penerbitan Sukuk negara yakni.

1. Diversifikasi sumber pembiayaan
SBSN bisa menjadi alternatif sumber pembiayaan selain SUN. SBSN bisa menjadi alternatif dalam mengurangi utang luar negeri.
2. Pengembangan pasar keuangan syariah
Sukuk telah menjadi maskot dalam industri syariah sehingga sukuk bisa mendorong kemajuan industri syariah di Indonesia
3. Pembiayaan Proyek
Sukuk menjadi salah satu sumber pendanaan proyek di berbagai instansi pemerintah, contoh departemen perhubungan dan departemen agama
4. Perluasan basis investor
Sukuk bisa menjadi instrumen perluasan basis investor mengingat pasar syariah masih sangat luas.
5. Alternatif Instrumen Investasi
6. Mengelola portofolio pembiayaan negara
7. Mendorong tertib pengelolaan BMN

4.5 Keuntungan Sukuk Negara

Investasi sukuk menguntungkan antara lain

1. Aman
Pembayaran dan Imbalan dijamin oleh negara
2. Sesuai dengan prinsip Syariah
Penerbitan sesuai dengan prinsip syariah dan telah mendapat fatwa MUI
3. Imbalan lebih tinggi dari suku bunga konvensional
Tingkat imbalan tetap dan dibayarkan setiap bulan sehingga tidak mengikuti tingkat suku bunga
4. Dapat diperdagangkan
Sukuk negara dapat diperdagangkan di pasar sekunder
5. Pajak lebih rendah
Pajak lebih rendah yakni 15% sedangkan deposito 20%
6. Dapat dijadikan jaminan
Dapat dijadikan jaminan bank

4.6 Jenis Sukuk Negara

Jenis Sukuk Negara antara lain :

1. SR → Sukuk Negara Ritel yang dijual khusus untuk investor individu WNI
2. SNI → Sukuk Valas, sukuk negara yang diterbitkan di pasar perdana internasional dalam denominasi valuta asing
3. SDHI → Sukuk dana haji, adalah sukuk negara yang diterbitkan khusus untuk penempatan dana haji pada sukuk negara
4. IFR → sukuk seri IFR adalah sukuk negara yang diterbitkan di pasar perdana dalam negeri yang denominasi rupiah
5. SPSN-S → merupakan sukuk negara yang diterbitkan dengan tenor kurang dari satu tahun
6. PBS → merupakan sukuk negara yang diterbitkan dengan menggunakan proyek sebagai underlying asset

4.7 Sukuk negara sebagai instrumen pembiayaan APBN

Penentuan APBN merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Berikut adalah tabel gambaran APBN dimana di dalamnya terdapat elemen pendapatan negara, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit anggaran dan pembiayaan.

A. Pendapatan Negara

- 1 Pendapatan dalam negeri
 - a Penerimaan Perpajakan
 - b Penerimaan Bukan Pajak
- 2 Penerimaan Hibah

B. Belanja Negara

- 1 Belanja Pemerintah Pusat
- 2 Transfer ke daerah

C Keseimbangan Primer *

D Surplus/defisit (A-B)

E Pembiayaan

- 1 Pembiayaan Dalam Negeri
- 2 Pembiayaan Luar Negeri

Dalam Struktur APBN terdapat unsur pembiayaan, dimana didalamnya terdapat pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Kedua pembiayaan baik dalam negeri maupun luar negeri akan dibiayai dari dua sumber pendanaan yang berbeda yakni dari utang dan non utang. Pendanaan utang berasal dari

1. Pinjaman luar negeri
2. Pinjaman dalam negeri
3. Surat Berharga

Pendanaan dari non utang berasal dari kas pemerintah, hasil penjualan aset dan lain-lain. Sedangkan Surat berharga yang dimaksud dalam pembiayaan yakni Surat Utang Negara atau disingkat Sun dan Surat Berharga Syariah atau yang disingkat dengan SBSN

4.8 Evolusi Keuangan Syariah di Indonesia

Keuangan Syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 dimana untuk pertama kalinya Indonesia memiliki Bank syariah pertama yakni Bank Muamalat. Sembilan tahun setelah berdirinya Bank syariah terbitlah Sukuk negara pada bulan Oktober tahun 2008. Penerbitan ini bertepatan dengan adanya krisis moneter yang melanda dunia. Banyak investor luar negeri resah dengan adanya ketidakpastian pasar. Mereka banyak yang menarik investasinya. Momentum ini dimanfaatkan pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Sukuk negara, sebuah investasi syariah yang menguntungkan kedua belah pihak.



- Industri keuangan syariah Indonesia mulai tumbuh dan berkembang pada awal 1990-an di bidang perbankan syariah yang dilanjutkan dengan kemunculan berbagai institusi keuangan syariah seperti asuransi syariah/takaful, perusahaan pembiayaan syariah, dan reksadana syariah.
- Pesatnya perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia antara lain didorong oleh pesatnya pertumbuhan institusi keuangan syariah dan kebutuhan masyarakat akan alternatif investasi.
- Pemerintah Indonesia, melalui penerbitan SBSN (Sukuk Negara), telah menyediakan alternatif investasi berbasis syariah yang banyak dibutuhkan oleh investor, baik syariah maupun konvensional.

4.9. Pembiayaan APBN

Melalui penerbitan ini pemerintah membiayai proyek-proyek di departemen dan juga memberikan dana kepada pemerintah untuk menutup defisit anggarannya. Defisit anggaran pemerintah biasanya ditutup dengan utang luar negeri yang sebenarnya justru memberikan beban kepada pemerintah untuk tahun-tahun kedepannya. Utang luar negeri menjadi beban rakyat secara turun menurun karena pelunasan utang luar negeri bisa puluhan tahun. Ide untuk mengurangi utang luar negeri ini salah satunya yakni dengan menerbitkan sukuk. Penerbitan ini diharapkan dapat menghimpun dana masyarakat untuk membiayai proyek-proyek pemerintah dimana keuntungannya juga untuk negara dan investor juga.

Berikut adalah data tentang pembiayaan APBN tahun 2014.

Pembiayaan APBN tahun 2014						
	2012		2013		2014	
	APBN-P	% thd PDB	APBN-P	% thd PDB	APBN	% thd PDB
Pendapatan Negara dan Hibah	1.358,2	15,9	1.502,0	16,0	1.667,1	16,1
Belanja Negara	1.548,3	18,1	1.726,2	18,4	1.842,5	17,8
Surplus/(defisit)	-190,1	-2,2	-224,2	-2,4	-175,4	-1,7
Pembiayaan	190,1	2,2	224,2	2,4	175,4	1,7
Pembiayaan dari Utang	155,2	1,8	214,9	2,3	185,1	1,8
Surat Berharga Negara (Neto)	159,6	1,9	231,8	2,5	205,1	2,0
Pinjaman Luar Negeri (Neto)	-4,4	-0,1	-16,9	-0,2	-20,9	-0,2
Lain - lain	34,9	0,4	9,3	0,1	-9,8	-0,1

Keterangan :

- Nominal dalam triliun Rupiah.
- Pembiayaan dari utang merupakan sumber utama pembiayaan untuk menutup defisit APBN.
- Lain - lain terdiri dari Perbankan Dalam Negeri dan Non-Perbankan Dalam Negeri (seperti Privatisasi, Hasil Pengelolaan Aset, Pinjaman Dalam Negeri, Dana Investasi Pemerintah, PMN, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dan Kewajiban Penjaminan).
- Pembiayaan Luar Negeri netto bernilai negatif menunjukkan penarikan pinjaman baru lebih rendah daripada pembayaran cicilan pokok utang LN.

Sumber :DJPU DEPKEU

Pada tabel diatas terlihat bahwa APBN Indonesia defisit secara fluktuatif dari tahun 2012 sampai 2014. Untuk tahun 2012 defisit 190,1 Trilyun Rupiah sedangkan pada tahun 2013 naik menjadi 224,2 Triyun Rupiah, dan pada tahun 2014 turun menjadi 175,4. Namun demikian angka itu masih fantastis. Defisit tersebut harus ditutup oleh pemerintah dengan utang. Utang negara Indonesia ada yang berasal dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang dalam negeri salah satunya yakni dengan menerbitkan sukuk. Dengan menerbitkan sukuk maka pemerintah mendapatkan keuntungan ganda yakni memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk berinvestasi dan yang ekdua secara tidak langsung mengurangi beban utang luar negeri.

4.10 Proyek yang didanai Sukuk negara

Berikut ini adalah contoh proyek/ kegiatan yang didanai Sukuk Tahun 2013 dan 2014

NO	Uraian kegiatan	Keterangan
1.	Nama Kegiatan	Pembangunan Jalur Ganda Lintas Cirebon-Kroya Segmen 1
2.	Instansi Pemrakarsa Proyek	Kementerian Perhubungan
3.	Nilai Pembiayaan	Total pembiayaan Rp. 1,5 Triliun <ul style="list-style-type: none">• Tahun 2013 : Rp. 800 Milyar• Tahun 2014 : Rp. 702 Milyar
4.	Rincian Aktivitas Proyek	Pekerjaan jalan Rel Pengadaan jembatan KA Persinyalan dan telekomunikasi KA Manajemen Konstruksi
5.	Urgensi pelaksanaan Proyek	<ul style="list-style-type: none">• Prioritas kegiatan untuk menjamin kelancaran distribusi barang, jasa dan informasi• Fokus prioritas untuk mendukung peningkatan daya saing sektor riil

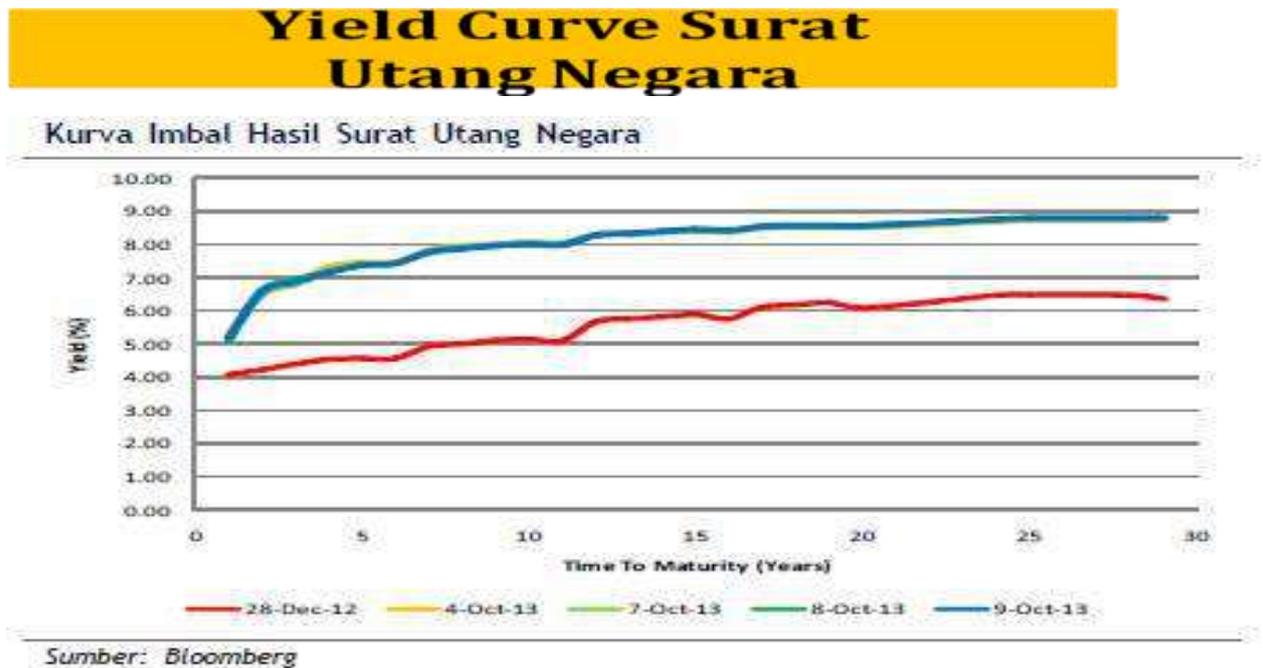
Dari tabel diatas disebutkan bahwa sukuk bisa untuk membiayai proyek di kementerian, sebagai contoh adalah kementerian perhubungan yang menelan total biaya 1,5 Trilyun. Yang dibagi menjadi dua tahap pendanaan yakni tahun 2013 dan 2014. Jenis pekerjaan yang dimaksud yakni kegiatan pembuatan jalan rel kereta api jalur Cirebon-Kroya.

Proyek/ Kegiatan yang didanai Sukuk Tahun 2014

NO	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	Pembangunan Jalur Ganda (Double Track) kereta api lintas Cirebon–kroya segmen 2	<ul style="list-style-type: none">• Instansi Pmrakarsa : Kementrian Perhubungan• Nilai pembiayaan Tahun 2014 : Rp.745 Milyar
2.	Proyek revitalisasi Asrama Haji/peningkatan sarana dan prasaran embarkasi haji	<ul style="list-style-type: none">• Instansi Pemrakarsa: kementrian Agama• Nilai pembiayaan tahun 2014 : Rp. 200 Milyar
3.	Pembangunan double –double track kereta api lintas Manggarai-bekasi	<ul style="list-style-type: none">• Instansi pemrakarsa : Kementrian Perhubungan• Nilai Pembiayaan Tahun 2014 : Rp 626 Milyar, daritotal rencana pembiayaan Rp. 2,7 Triliun untuk pelaksanaan selama 3 tahun

Selain melanjutkan pembiayaan jalur kereta api, sukuk juga untuk membiayai revitalisasi asrama haji yang dilaksanakan atas prakarsa departemen agama.

4.11 Harga SBSN dibandingkan SUN



Dalam grafik diatas terlihat bahwa garis merah merupakan garis Surat Utang negara atau SUN dan garis biru adalah Surat Berharga Syariah atau SBSN. Terlihat bahwa harga SBSN lebih mahal dibandingkan dengan SUN, Artinya pemerintah harus membayar lebih mahal untuk investasi SBSN dibandingkan dengan SUN

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- Penerbitan Sukuk masih belum optimal karena hanya sebatas instrumen pendukung untuk mengurangi beban utang negara
- Penerbitan Sukuk perlu ditingkatkan pengelolaannya agar lebih efisien dan efektif
- Sosialisasi di masyarakat kurang sehingga nominal penjualan sukuk masih rendah

5.2 Saran

- Sukuk negara Ritel dan Sukuk Global merupakan benchmark industri syariah di dunia, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan.
- Sebagai negara yang mayoritas muslim sudah sepatutnya Sukuk menjadi simbol industri syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adam, Nathif.J &Abdulkader Thomas,Islamic Bonds;Your Guide to issuing, Structuring and Inventing in Sukuk,London, Euromoney Books. 2004
2. Ali,AM.Hasan & M.Nadrattuzaman Hosen,Tanya Jawab Ekonomi Syariah, Jakarta.Komuniaksi Ekonomi Syariah,2007
3. Al-kaaf, Abdullah Zaky, Ekonomi dalam Perspektif Islam, bandung, CV Pustaka Setia 2002.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
5. Jones,C.O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Istamto. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
6. Hamidi,M.Luthfi, Jejak-Jejak Ekonomi Syariah, Jakarta,Senayan Abadi Publishing,2003.
7. Hoogerwerf. (1983). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.
8. O'Neill,Sian Sukuk and Islamic Capital Markets: A pRactical Guide. Blobe Publishing Ltd. 2011
9. Taqi, Usmani Muhammad.An Introduction to Islamic Finance,Mehran Printers, Karachi.Pakistam. 2005
10. Undang-Undang Syariah Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat berharga Syariah Negara

Lampiran 1**SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITI**

NO	NAMA/NIDN	INSTITUSI ASAL	BIDANG ILMU	ALOKASI WAKTU	TUGAS
1	Setyo Kuncoro,S.S.,M.A./0014127105	Universitas Terbuka	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	2jam/minggu	<ul style="list-style-type: none">• Mengkoordinir kegiatan perencanaan penelitian• Mengkoordinir kegiatan pelaksanaan penelitian• Mengkoordinir kegiatan evaluasi• Mengkoordinir finalisasi laporan penelitian
2	Drs. Agus Priyanto,M.Si	Universitas Terbuka	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	2jam/minggu	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan kegiatan perencanaan penelitian• Melaksanakan kegiatan pelaksanaan penelitian• Melaksanakan kegiatan evaluasi• Melaksanakan finalisasi laporan penelitian
3	Drs. Jasrial,M.Si	Universitas Terbuka	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	2jam/minggu	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan kegiatan perencanaan penelitian• Melaksanakan kegiatan pelaksanaan penelitian• Melaksanakan kegiatan evaluasi• Melaksanakan finalisasi laporan penelitian

Lampiran 2

BIODATA KETUA TIM PENELITI

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Setyo Kuncoro,SS.M.A
2	Jenis Kelamin	Laki Laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP	19711214 199303 1 001
5	NIDN	0014127105
6	Tempat dan Tanggal Lahir	malang, 14 Desember 1971
7	E-mail	kuncoro@ut.ac.id
8	Nomor Telepon/Faks	021-74909941 ext.1927
9	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 ≥ 1000 orang
10	Mata Kuliah yang Diampu	1. Asas-Asas Manajemen
		1. Uang dan Perbankan
		2. Ekonomi pemerintahan
		3. Operasional Bank

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas jember	Universitas Indonesia	-
Bidang Ilmu	Sastra Inggris	Ilmu Administrasi	
Tahun Masuk-Lulus	1992-1998	2008-2011	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	The Glory of Russian Peasants as the background of social condition of “The Cherry Orchard”	Analisis Persepsi Mahasiswa FISIP-UPBJJ Jakarta terhadap Proses Belajar di universitas Terbuka	
Nama Pembimbing/Promotor	Prof. Gunawan Hupoyo	Dr. Amy Rahayu	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2012	Persepsi Mahasiswa UT-UPBJJ Malang dan Kupang terhadap layanan UT	UT	30.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2013	Panitia Bansos Peternak Susu Susu di kelurahan Tajurhalang Cijeruk Bogor Jawa Barat	UT	50
2.	2013	Panitia Bansos Pakan ternak di kelurahan Tajurhalang Cijeruk Bogor Jawa Barat	UT	75
3.	2013	Fasilitator Pelatihan Pelatihan Administrasi Keuangan di kecamatan Parung	FISIP-UT	9
1	2012	Pelatihan Administrasi Keuangan Daerah bagi Aparat Desa Pondok Cabe Udik Kota Tangsel	UT	
3.	2012	Monitoring Bansos Pengelolaan Sampah UT ke Ciledug Tangerang	UT	
4.	2011	Monitoring Penghijauan UT di Situ Gintung	UT	

BIODATA ANGGOTA TIM PENELITIAN

A. Identitas Diri

IDENTITAS DIRI

Nama : Drs. Agus Priyanto, M.Si
NIDN : 0024056703
NIP/NIK : 19670524 200003 1 001
Tempat dan Tanggal Lahir : Temanggung, 24 Mei 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Golongan / Pangkat : III/b / Penata Muda Tk. 1
Jabatan Akademik : Lektor
Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka
Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,
Tangsel 15418
Telp./Faks. : (021) 7490941 / (021) 7490147
Alamat Rumah : Peru Bojong Depok Baru Blk Di/11, RT03/08
Kedung Waringin, Bojong Gede, Kab. Bogor.
Telp./Faks. : 081317116444
Alamat e-mail : guspri@ut.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
1992	Strata 1	Universitas Diponegoro	Bahasa dan Sastra Inggris

2008	Strata 2	Universitas Indonesia	Ilmu Administrasi
------	----------	-----------------------	-------------------

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/anggota Tim	Sumber Dana
2009	PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN dalam PENCIPTAAN KEUNGGULAN KOMPETITIF dan PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK (STUDI KASUS PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN)	Anggota	LPPM UT
2010	Pengaruh Citra Merek (Brand Image) Perguruan Tinggi Terhadap Preferensi Pemilihan Program Studi di Sebuah Perguruan Tinggi di Kalangan Siswa SLTA (Studi Perbandingan pada Tiga Perguruan Tinggi Negeri: UI, ITB dan UGM)	Ketua	LPPM UT
2010	Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Work Engagement Pegawai UT	Anggota	LPPM UT
2011	Signifikansi Penerapan Sistem Persediaan dengan Model Economic Order Quantity (EOQ) pada Satu Kayu Desain Enterprise dalam Upaya pencapaian Sustainable Competitive Advantage.	Ketua	LPPM UT
2011	Tindak Pidana Perpajakan (Studi Tentang Sengketa Pajak Daerah)	Anggota	LPPM UT
2012	Analysis persepsi mahasiswa UT terhadap Kualitas Proses Belajar di UT (kajian mahasiswa UPBJJ UT Kupang dan Malang)	Anggota	LPPM UT

KARYA ILMIAH*

Tahun	Judul	Penyelenggara
2008	Review Online Course UMBC	FISIP UT
2009	Pelayanan Kelas Dunia PT Pelindo	FISIP-UT

2010	Kesadaran Merek	FISIP UT
2010	The Implementation of Academic Qualification Policy for Primary School Teacher in Belitung Local Government Through Distance Higher Education	Asosiasi Profesi Pendidikan jarak jauh Indonesia & Dikti
2011	Job Satisfaction and Its impact to Work Engagement of UTs Employ (case Study at UTs Head Office)	ICDE World Conference
2012	The Custom Made Strategy of Satu Kayu Desain Enterprise in Efforting to Achieve Sustainable Competitive Advantage	Universitas parahyangan Bandung

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/ Jurusan/ Program Studi	Sem/Tahun Akademik
Riset Operasi	Strata 1	Ilmu Administrasi Niaga	Gasal 2010
Kebijakan dan Strategi Produksi	Strata 1	Ilmu Administrasi Bisnis	Gasal 2010
Tugas Akhir Program	Strata 1	Ilmu Administrasi Niaga	Gasal 2010
Manajemen Stratejik Organisasi Publik	Strata 2	Magister Administrasi Publik	Gasal 2010
Riset Operasi	Strata 1	Ilmu Administrasi Niaga	Genap 2010
Kebijakan dan Strategi Produksi	Strata 1	Ilmu Administrasi Niaga	Genap 2010
Tugas Akhir Program	Strata 1	Ilmu Administrasi Niaga	Genap 2010
Manajemen Stratejik Organisasi Publik	Strata 2	Magister Administrasi Publik	Genap 2010
Kebijakan dan Strategi Produksi	Strata 1	Ilmu Administrasi Niaga	Gasal 2011
Riset Operasi	Strata 1	Ilmu Administrasi Niaga	Gasal 2011
Tugas Akhir Program	Strata 1	Ilmu Administrasi Niaga	Gasal 2011
Manajemen Stratejik Organisasi	Strata 2	Magister Administrasi	Gasal 2011

Publik		Publik	
Kebijakan dan Strategi Produksi	Strata 1	Ilmu administrasi Niaga	Genap 2011
Riset Operasi	Strata 1	Ilmu Administrasi Niaga	Genap 2011
Tugas Akhir program	Strata 1	Ilmu Administrasi Niaga	Genap 2011
Manajemen Stratejik Organisasi Publik	Strata 2	Magister Administrasi Publik	Genap 2011
Kebijakan dan Strategi Produksi	Strata 1	Ilmu Administrasi Niaga	Gasal 2012
Riset Operasi	Strata 1	Ilmu Administrasi Niaga	Gasal 2012
Tugas Akhir Program	Strata 1	Ilmu Administrasi Niaga	Gasal 2012
Manajemen Stratejik Organisasi Publik	Strata 2	Magister Administrasi Publik	Gasal 2012
Kebijakan dan Strategi Produksi	Strata 1	Ilmu Administrasi Niaga	Genap 2012
Riset Operasi	Strata 1	Ilmu Administrasi Niaga	Genap 2012
Tugas Akhir Program	Strata 1	Ilmu Administrasi Niaga	Genap 2012
Manajemen Stratejik Organisasi Publik	Strata 2	Magister Administrasi Publik	Genap 2012

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2009	Pelatihan peningkatan motivasi	kel Karang Tengah, Kec . Gunung Puyuh, Sukabumi
2009	Sosialisasi Program FISIP-UT	kel Karang Tengah, Kec . Gunung Puyuh, Sukabumi
2010	Program Bantuan Sosial Bidang Pendidikan	Kel. Pondok Cabe Udik dan Pondok cabe Ilir, Tangerang Selatan

2011	Program pelatihan wirausaha mahasiswa UPBJJ-UT Jakarta	Wisma UT, Pondok cabe, Tangerang Selatan
2011	Programm Pengelolaan Keuangan Keluarga	Cipanas, Cianjur
2012	Program Penyuluhan Pengelolaan Keuangan Kelurahan bagi aparat kelurahan di Lingkungan kecamatan Pamulang.	SD Dharma Karya, Pondok Cabe, Pamulang, tangerang Selatan

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Indonesia	Simon Fraser University, Vancouver, Canada	-
Bidang Ilmu	Ilmu Politik	Distance Education Manajement	
Tahun Masuk-Lulus	1978-1985	1986-1988	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Faktor2 Eksternal yang mempengaruhi isolasi sosialisme Burma	<i>Peer Interaction: Case study UT's student</i>	
Nama Pembimbing/Promotor	<ul style="list-style-type: none"> • Prof Dr Burhan Magenda • Prof.Dr. Maswadi Rauf,M.A. 	Thomas O'Shea, Ph D	

E. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2009	Pengembangan Model Pembelajaran Melek Media Televisi, Laporan Hasil Penelitian Hibah Penelitian Strategis Nasional	UT	100.000.000
2.	2008	Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR): Studi tentang filantropi pada	UT	30.000.000

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
		Perusahaan Media Massa		

- Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber

F. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2012	Manajemen Dokumentasi Pemerintahan Desa, Desa Pondok Cabe Ilir	UT	
2.	2011	Penghijauan di Situ Gitung dan monitoring bantuan sosial pengolahan sampah	UT	
3.	2010	Pengembangan Model Pembelajaran Melek Media TV pada anak2 Sekolah Dasar di SD Babakan, Ciputat	UT	

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata ada ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian Universitas Terbuka

Tangsel, 21 Februari 2014

Pengusul

(Setyo Kuncoro,SS.M.A).

Lampiran 3

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setyo kuncoro,SS.M.A

NIDN : 0014127105

Pangkat / Golongan : Penata Muda Tingkat I / III/a

Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

Analisis kebijakan Implementasi SUKUK Negara dalam pembiayaan APBN yang diusulkan dalam skema Penelitian lanjut – UT untuk tahun anggaran 2014 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Tangerang Selatan, 21 Februari 2014

Mengetahui,
Ketua LPPM - UT

Yang Menyatakan,

(Ir. Kristanti Ambar Puspitasari .Phd.)
NIP. 196102121986032001

(Setyo Kuncorom,SS.M.A.)
NIP. 197112141999031001

Lampiran 4

A. Anggaran Biaya

Berikut adalah rincian anggaran penelitian.

A	PELAKSANAAN	JUMLAH BIAYA
	Gaji/Upah	
1.	Ketua Tim Peneliti (koordinator)	
	1 orang x 8 bulan x 4 minggu (10 jam) x Rp 10.000	Rp 3.200.000,-
2.	Anggota Tim Peneliti	
	2 orang x 8 bulan x 4 minggu (10 jam) x Rp 6.000,-	Rp 2.160.000,-
3.	Teknisi/Administrasi	
	1 orang x 8 bulan x 4 minggu (10 jam) x Rp 2.500,-	Rp 900.000,-
4.	Honorarium Narasumber	
	3 orang X 2 jam x Rp 1.000.000,-	Rp 6.000.000,-
	Subtotal	Rp 12.200.000,-
	B	PERALATAN
1.	Biaya Sewa Handycam 4 hari X Rp.350.000	Rp 1.400.000,-
2.	3 (dua) Flash Disk Recorder @ Rp 1.200.000,-	Rp 3.600.000,-
3.	3 (dua) USB/Flash Disk 32 GB	Rp. 540.000,-
	Subtotal	Rp 5.540.000,-
	C	BAHAN ABIS PAKAI
1.	ATK (kertas HVS, Blocknote, dll)	Rp 1.000.000,-
2.	Tinta Printer dll	Rp 350.000,-
3.	Fotokopi dokumen tertulis/references	Rp 1.500.000,-
	Subtotal	Rp 2.850.000,-
	D.	PERJALANAN
1.	Transportasi	
	Tangerang Selatan (Banten)- Jakarta	Rp 3.600.000,-
	3 orang x 3 (PP) X Rp. 400.000,-	
	Subtotal	Rp 2.400.000,-
	E	PERTEMUAN
1.	Sosialisasi	
	4 orang x 3 hari x Rp 50.000,-	Rp. 600.000,-
2.	Rapat koordinator/evaluasi	
	3 orang x 5 pertemuan x Rp 50.000,-	Rp 750.000,-
3.	Seminar laporan penelitian (terbatas)	Rp 1.000.000,-
	Subtotal	Rp 2.600.000,-
	F	LAPORAN
1.	Pengolahan (transkrip dan analisa) data	Rp 500.000,-
2.	Penulisan draf laporan dan perbaikan	Rp 500.000,-
3.	Editing dan finalisasi laporan akhir	Rp 500.000,-

4.	Penggandaan laporan akhir, 25 exp, 100 halaman	Rp 500.000,-
	Subtotal	Rp 2.000.000,-
G	LAIN-LAIN	
	Perijinan, administrasi, dll	Rp 2.000.000,-
	Subtotal	Rp 2.000.000,-
	JUMLAH KESELURUHAN	
A	Pelaksanaan	Rp 12.200.000,-
B	Peralatan	Rp 5.540.000,-
C	Bahan Habis Pakai	Rp 2.850.000,-
D	Perjalanan	Rp 3.000.000,-
E	Pertemuan	Rp 3.100.000,-
F	Laporan	Rp 2.000.000,-
G	Lain-lain	Rp 2.000.000,-
	TOTAL	Rp 30.940.000,-
	(Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Empat Puluh Ribu Rupiah)	

Lampiran 5. Jadwal penelitian

Waktu yang diperlukan untuk melakukan dalam penelitian ini adalah 9 (sembilan) bulan terhitung sejak proposal penelitian ini disetujui. Adapun rincian kegiatannya sbb.

Tabel 1. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan (Tahun 2014) ke-								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penyusunan Proposal									
2.	Perbaikan Proposal									
3.	Penyusunan Instrumen									
4.	Uji coba Instrumen									
5.	Perbaikan Instrumen									
6.	Pelaksanaan Penelitian									
	Wawancara									
	Studi literatur									
7.	Pengolahan data									
8.	Analisis data									

No.	Kegiatan	Bulan (Tahun 2014) ke-								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Penyusunan <i>draft</i> laporan									
10.	Seminar hasil									
11.	Finalisasi laporan									
12.	Penulisan artikel ilmiah									

Lampiran 6. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara dengan Akademisi

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	Prinsip keuangan syariah	
1.	Apakah yang dimaksud dengan Syariah?	
2.	Apakah yang dimaksud dengan keuangan Syariah (Islamic Finance)	
3.	Jelaskan tujuan keuangan/ekonomi Syariah?	
4.	Apakah prinsip-prinsip dasar transaksi dalam keuangan Syariah?	
5.	Apakah yang dimaksud dengan Riba (unsure/interest)?	
6.	Apakah yang dimaksud dengan Gharar (Uncertainty)?	
7.	Apakah yang dimaksud dengan Maysir (Speculation)	
8.	Bagaimana pandangan keuangan/ekonomi syariah terhadap riba?	
9.	Bagaimana pandangan keuangan/ekonomi syariah terhadap bunga bank?	
10.	Bagaimana fungsi uang dalam	

	keuangan/ekonomi syariah?	
11.	Bagaimana pandangan keuangan/ekonomi syariah terhadap utang?	
12.	Apakah yang dimaksud dengan sistem bagi hasil?	
13.	Apakah yang dimaksud dengan ujarah/fee?	
	Pasar Keuangan Syariah	
14.	Bagaimana kondisi pasar keuangan syariah Internasional?	
15.	Bagaimana perkembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri	
16.	Lembaga-lembaga keuangan internasioanal mana saja yang mendukung pasar keuangan syariah?	
17.	Bagaimana perkembangan instrument keuangan syariah saat ini?	
18.	Negara-negara mana saja yang menerbitkan <i>sovereign sukuk</i> (sukuk Negara) sampai saat ini?	
19.	Apakah sudah ada Negara lain yang memiliki undang-undang khusus sebagai basis hukum penerbitan SUKUK?	
20.	Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan pesatnya perkembangan instrument keuangan syariah khususnya SUKUK?	
21.	Bagaimanakah potensi permintaan SUKUK Negara oleh investor domestic maupun luar negeri saat ini?	
	SUKUK	
22.	Apakah yang dimaksud dengan SUKUK?	
23.	Bagaimanakah karakteristik SUKUK?	

24.	Apakah perbedaan SUKUK dengan obligasi konvensional?	
25.	Apakah menurut Anda Sukuk merupakan sebuah solusi yang tepat untuk mengurangi utang Negara? Alasannya	
26.	Apakah menurut Anda Sukuk merupakan sebuah solusi yang tepat sebagai alat pembiayaan APBN? Alasannya...	
27.	Seberapa besarkan peran SUKUK dalam pembiayaan APBN?	

Pedoman Wawancara dengan Stakeholder di Direktorat Pembiayaan Syariah DEPKEU

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah tujuan diterbitkannya SUKUK?	
2.	Bagaimanakah perkembangan SUKUK selama ini?	
3.	Siapa sajakah yang terlibat dalam penerbitan SUKUK?	
4.	Bagaimanakah prosedur penjualan SUKUK?	
5.	Agent penjual manakah yang menjual SUKUK?	
6.	Dipergunakan Untuk apa sajakakah hasil penjualan SUKUK	
7.	Apakah ada hubungan SUKUK dengan pembiayaan APBN?	
8.	Jika memang iya apakah selama ini SUKUK memberikan pengaruh besar terhadap pembiayaan APBN?	
9.	Hal-hal apa sajakah dalam APBN yang dibiayai SUKUK?	

10.	Dalam pembiayaan proyek oleh SUKUK, hal apakah yang menjadi dasar pertimbangannya?	
11.	Menurut Anda apakah SUKUK benar-benar efektif sebagai salah satu alat untuk pembiayaan APBN? mengapa?	
12.	Apakah kegunaan SUKUK selain untuk pembiayaan APBN?	

Pedoman Wawancara dengan Agent Penjual

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Mengapa Bank/ Sekuritas yang Anda pimpin tertarik untuk menjual SUKUK?	
2.	Bagaimanakah sistem penjualannya?	
3.	Keuntungan apakah yang didapat dari hasil penjualan SUKUK?	
4.	Untuk apakah hasil penjualan SUKUK tersebut	
5.	Bagaimanakah penjualan SUKUK selama ini?	
6.	Bagaimanakah prospek penjualan SUKUK pada tahun kedepan?	
7.	Apakah mekanisme penjualan SUKUK menurut Anda sudah fair?	
8.	Apakah dari penjualan ini pembeli diuntungkan?	
9.	Apakah dari hasil penjualan ini masyarakat diuntungkan?	
10.	Apa harapan Anda terhadap penerbitan SUKUK ini?	

11.	Apakah ada kaitannya dengan pembiayaan APBN	
12.	Jika iya maka sejauh mana peran SUKUK dalam pembiayaan APBN?	
13.	Proyek apa sajakah yang dibiayai oleh SUKUK dalam pembiayaan APBN?	
14.	Menurut Anda apakah SUKUK efektif dalam pembiayaan APBN?	